

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Model dasar dari suatu perusahaan bisnis diperoleh dari teori perusahaan (*theory of firm*) (Sitio, 2001). Teori perusahaan menekankan bahwa perusahaan perlu menetapkan tujuan, sehingga dengan demikian perusahaan dapat menentukan apa yang harus dilakukan, menyusun program aksinya, menetapkan sasarnya, menyusun indicator keberhasilannya, serta strategi dan taktik apa yang harus dilaksanakan (Sitio, 2001). Dalam menjalankan usahanya, suatu perusahaan membutuhkan lembaga keuangan untuk mendukung kegiatan operasional serta pertumbuhan perusahaan seperti dalam hal pembiayaan. Dalam memberikan pembiayaan, sebuah lembaga keuangan melihat kinerja keuangan sebagai indikator kompetensi perusahaan sebelum lembaga keuangan tersebut memberikan pembiayaan atau tidak (Simatupang, 2020). Selain kinerja keuangan, saat ini pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan mulai mempertimbangkan aspek keberlanjutan dalam keputusannya (OJK, 2014). Inisiatif global dari beberapa lembaga keuangan di dunia telah dibentuk untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, seperti *Equator Principles Financial Institutions* (EPFIs) yang berkomitmen untuk menerapkan *Equator Principles* (EP) yang dimaksudkan sebagai dasar umum dan kerangka Manajemen Risiko bagi Lembaga keuangan untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola Risiko lingkungan dan social saat perusahaan tersebut akan memberikan pembiayaan. *Equator Principles*

(EP) telah menjadi standar industri keuangan untuk manajemen risiko lingkungan dan sosial dalam proyek. Lembaga keuangan mengadopsi EP untuk memastikan bahwa proyek yang mereka biayai dikembangkan dengan cara yang bertanggung jawab secara sosial dan mencerminkan praktik pengelolaan lingkungan yang baik (Equator Principles Association, 2020). Inisiatif internasional lainnya adalah pembentukan pedoman Global Reporting Initiative (GRI) yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun laporan keberlanjutan. Laporan keberlanjutan merupakan bentuk laporan yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam rangka untuk mengungkapkan (*discloser*) atau mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan mengenai kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial masyarakat secara akuntabel (OJK, 2014).

Pada 2 Agustus 2015, di markas PBB, New York, secara aklamasi 193 negara anggota PBB mengadopsi dokumen yang berjudul “*Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*” dengan tagline “*Leave No One Behind*” (Nations, 2015). Dokumen ini mengesahkan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan 169 target yang menunjukkan skala dan ambisi dari agenda tersebut yang memperlihatkan masalah *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang harus ditangani sebelum tahun 2030. *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan kelanjutan dan perluasan dari *Millenium Development Goals* (MDGs) yang disahkan pada 8 September 2000 saat diadakannya KTT (Konferensi Tingkat Tinggi) di New York oleh 189 negara anggota PBB dan disepakati untuk dicapai pada tahun 2015. Sebelum berakhirnya *Millenium Development Goals* (MDGs), telah dicetuskan agenda pembangunan dunia pasca 2015 pada *UN Summit on*

*MDGs* 2010. Hal ini diperkuat dengan disepakatinya dokumen “*The Future We Want*” dalam *UN Conference on Sustainable Development* 2012. Isu tersebut menjadi pendorong utama agenda pembangunan yang telah disepakati di sidang umum PBB pada September 2015, yaitu Agenda 2030 untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Evolusi dari *Millenium Development Goals* (MDGs) ke *Sustainable Development Goals* (SDGs) mencerminkan perubahan pendekatan terhadap pembangunan global (Commission & Development, 2018). Berbeda dengan *Millenium Development Goals* (MDGs) yang bersifat birokratis dan teknokratis dan hanya ditujukan pada negara-negara berkembang, penyusunan butir-butir *Sustainable Development Goals* (SDGs) lebih inklusif melibatkan banyak pihak termasuk organisasi masyarakat sipil atau *Civil Society Organization* (CSO) dan *Sustainable Development Goals* (SDGs) memiliki sasaran yang lebih universal (Wahyuningsih, 2018). Penyusunan SDGs sendiri memiliki beberapa tantangan karena masih terdapat beberapa butir-butir target *Millenium Development Goals* (MDGs) yang belum tercapai dan harus diteruskan di dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Perjalanan *Sustainable Development Goals* (SDGs) tidak berakhir di Agenda 2030, namun dilanjutkan dengan dilaksanakannya Konferensi Tingkat Tinggi *Group of Twenty* (G20) bulan Oktober 2021 di Roma. Indonesia sebagai salah satu negara anggota G20, secara resmi memegang Presidensi G20 selama 1 tahun penuh, yakni dimulai pada tanggal 1 Desember 2021 hingga November 2022. Presidensi G20 mengusung tema “*Recover Together, Recover Stronger*”. Melalui

tema tersebut, Indonesia mengajak seluruh dunia untuk bersama-sama mencapai pemulihan yang lebih kuat dan berkelanjutan. Pertumbuhan yang inklusif, *people-centered*, serta ramah lingkungan dan berkelanjutan, menjadi komitmen utama kepemimpinan Indonesia di G20. Indonesia membentuk *G20 Sustainable Finance Working Group* (SFWG) dan mendukung *G20 Sustainable Finance Roadmap and the Synthesis Report* sebagai salah satu wujud dalam mendukung keuangan berkelanjutan (European Council, 2021). Di Kawasan Asia Tenggara, ASEAN memiliki kewajiban untuk mengetahui kondisi dan ambisi masa depan yang dapat dicapai oleh negara-negara anggotanya, termasuk sejauh mana SDGs diimplementasikan agar tujuan agenda UNDP tercapai pada tahun 2030. ASEAN menjawab tujuan tersebut dapat digapai dengan memperkuat kemampuan finansial yang diungkap pada *Report On Financing SGDs ASEAN* (ASEAN, 2017).

Dalam mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs), salah satu standar yang sering digunakan sebagai parameter dalam pelaksanaan pembangunan adalah standar *Environmental, Social, and Governance* (ESG) (KPBU Kemenkeu, 2022). *Factor Environmental, Social, and Governance* (ESG) berdampak pada perekonomian dan merupakan sesuatu yang harus dipandang sebagai peluang dan tantangan dalam isu keuangan berkelanjutan (PPPK Kemenkeu, 2022). Pembahasan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) selalu menjadi topik hangat yang akan dibahas dalam dunia bisnis (Awaysheh *et al.*, 2020). Pembahasan ini tidak hanya sekadar kewajiban tetapi juga memiliki daya Tarik tersendiri bagi perusahaan. *Environmental, Social, and Governance* (ESG) saling terkait dan secara tidak langsung dapat mempengaruhi kegiatan dan kinerja suatu perusahaan

(López-Toro *et al.*, 2021). *Environmental, Social, and Governance (ESG) Report* merupakan salah satu cara untuk melihat perkembangan kegiatan bisnis dan rencana perusahaan kedepannya serta Risiko yang akan dihadapi. Dengan mempublikasikan *Environmental, Social, and Governance (ESG) Report* yang mengungkapkan operasi bisnis yang terkait dengan keberlanjutan, maka reputasi perusahaan akan meningkat, dan reputasi perusahaan yang baik akan menciptakan kinerja perusahaan yang lebih baik (Tarmuji *et al.*, 2016). Perusahaan berupaya meningkatkan kinerja *Environmental, Social, and Governance (ESG)* sebagai bagian dari strategi penting perusahaan dalam pembangunan berkelanjutan, yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja perusahaan secara keseluruhan (Kuo *et al.*, 2021).

Dengan adanya pengungkapan *Environmental, Social, and Governance (ESG)* tentunya menjadi suatu hal yang bisa dijadikan tolak ukur dari keberhasilan suatu perusahaan untuk melaksanakan kewajibannya akan tanggung jawab social dan lingkungannya. Disamping itu tentunya akan menambah kepercayaan dan dukungan dari investor. Hal ini dapat dilihat dari investasi lokal dimana total dana kelolaan reksa dana yang mengacu kepada indeks saham bertema *Environmental, Social, and Governance (ESG)* adalah sebesar Rp3,4 triliun pada Oktober 2021 yang naik 80 kali lipat dari total dana kelolaan di tahun 2016 sebesar Rp42,2 miliar (KEHATI, 2021).

*Environmental, Social, and Governance (ESG)* mengukur informasi keberlanjutan perusahaan secara komprehensif (Triyani *et al.*, 2020). Ada tiga aspek atau sub-komponen dalam skor *Environmental, Social, and Governance (ESG)*,

yaitu: *Environmental Disclosure* (EVN), *Social Disclosure* (CSR), dan *Governance Disclosure* (CG). Aspek *Environmental Disclosure* berkaitan dengan bagaimana pertimbangan institusi dalam memposisikan diri terhadap isu lingkungan maupun konservasi sumber daya alam. Aspek *Social Disclosure* berkenaan dengan pengelolaan hubungan sosial antara satu dengan lainnya. Sedangkan aspek *Governance Disclosure* berkaitan dengan standar dalam menjalankan institusi sesuai prinsip tata kelola yang baik (*good governance*). Penilaian rata-rata sub komponen dalam ESG yaitu: EVN, CSR, dan CG, kemudian dijadikan satu menjadi ESG, maka keseluruhan penilaian tersebut akan menjadi pengukuran Laporan kinerja keberlanjutan keuangan di suatu perusahaan. *United Nations Sustainable Stock Exchanges Initiative* mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktik berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan ke dalam siklus pelaporan perusahaan (Sustainable Stock Exchanges, 2019).

Setiap aspek memiliki indikatornya sendiri untuk menilai kinerja keberlanjutan perusahaan. Dengan menggunakan pengukuran yang telah memasukkan tiga aspek tanggung jawab social perusahaan, skor *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dapat digunakan oleh investor sebagai alat untuk lebih mengevaluasi kinerja keberlanjutan perusahaan secara komprehensif (Zuraida *et al.*, 2016).

Adopsi ESG di Asia masih lebih baru dibandingkan dengan penerapan ESG di wilayah Amerika Serikat (Korwatanasakul, 2020) yang juga ditunjukkan dengan

masih sedikitnya penelitian mengenai ESG di Asia, khususnya di ASEAN, dibandingkan dengan negara-negara Eropa atau Amerika Serikat (Li *et al.*, 2021).

Negara-negara anggota ASEAN memiliki kebijakan pengembangan dan implementasi ESG yang berbeda-beda. Sejalan dengan hal tersebut, kesadaran, pengungkapan, dan transparansi mengenai ESG telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini terlihat dari promosi aktif dan dorongan perubahan kebijakan, peraturan, dan pedoman oleh para pemangku kepentingan di sektor swasta dan publik, seperti di Masyarakat sipil atau inisiatif yang dipimpin oleh pemerintah di negara-negara anggota ASEAN (Korwatanasakul, 2020). Sebagai contoh, organisasi non-pemerintah dan organisasi profesional, seperti Program Bisnis Keberlanjutan (*Business Sustainability Program*) di Malaysia yang didirikan untuk mempromosikan dan mengedukasi perusahaan agar memasukkan keberlanjutan ke dalam strategi bisnis mereka. Selain itu, Pusat Keberlanjutan Nasional (*National Center fo Sustainability*) di Indonesia yang menyoroti pentingnya pengungkapan ESG.

Sebagai salah satu otoritas pada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentunya memiliki peran untuk mensukseskan *Sustainable Development Goals* (SDGs) melalui program keuangan berkelanjutan (*sustainable finance*) dengan menyusun Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap I (2015 – 2019) sebagai langkah awal meningkatkan kesadaran dan kapasitas Industri Jasa Keuangan (IJK) untuk menerapkan aspek *Environmental, Social, and Governance* (ESG) serta melakukan adaptasi perubahan iklim menuju ekonomi rendah karbon. Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap I akan menjadi acuan bagi

OJK dan pelaku industri jasa keuangan serta pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan terutama pemerintah, pelaku industri maupun lembaga internasional. Kemudian dilanjutkan dengan adanya peraturan terbaru POJK Nomor 51/POJK.03/2017 dimana lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan public diwajibkan untuk melaporkan rencana aksi perusahaan dan laporan keberlanjutan kepada OJK yang dimulai pada tahun 2019. Sebagai tindak lanjut, OJK juga telah menyusun Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021 – 2025) dengan beberapa program strategis untuk mempercepat penerapan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola di Indonesia. Roadmap Tahap II berfokus pada penciptaan ekosistem keuangan berkelanjutan secara komprehensif, dengan melibatkan seluruh pihak terkait dan mendorong pengembangan kerja sama dengan pihak lain. Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II diharapkan dapat menjadi landasan bagi Sektor Jasa Keuangan dan rujukan untuk Kementerian/Lembaga terkait dalam mengembangkan inisiatif-inisiatif pembiayaan inovatif.

Pemerintah dan sektor swasta dapat mendorong pengembangan ESG. Di tingkat pemerintah, kebijakan dan peraturan yang ditargetkan tentang ESG masih cukup kurang (Korwatanasakul, 2020). Dalam hal ini, langkah-langkah nasional lebih lanjut adalah kunci untuk membuka potensi perusahaan di Kawasan ASEAN dengan mempercepat penyerapan dukungan untuk investasi ESG. Hal ini sebagian besar telah dilakukan di sektor keuangan, mengingat penerapan ESG pertama kali difokuskan pada sektor keuangan (Korwatanasakul, 2020). Dengan perusahaan sektor keuangan ikut mengungkapkan segala aktivitas bisnis yang berkaitan dengan

keuangan dan nonkeuangan pada *ESG Report*, diharapkan dapat membantu reputasi perusahaan tersebut yang lebih baik, dan reputasi perusahaan yang baik bisa mendorong kinerja perusahaan lebih baik lagi. Jumlah lembaga keuangan yang mengintegrasikan ESG dalam proses pengambilan keputusan mereka sedang meningkat secara global, dan diperkirakan akan meningkat pada perekonomian pasca-Covid karena penelitian menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan dengan peringkat ESG yang tinggi mampu bertahan lebih baik dibandingkan pesaing mereka selama masa krisis (PWC, 2020).

Kementerian Keuangan melakukan tindak lanjut pengimplementasian ESG dengan dukungan dari *United Nations Development Programme* (UNDP) dan Pemerintah Kanada terkait pembiayaan infrastruktur. Kebijakan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) ini akan memberikan panduan yang jelas untuk seluruh pemangku kepentingan proyek infrastruktur, terutama mengenai peran dan tindakan yang perlu diambil untuk memastikan proyek infrastruktur tersebut memenuhi aspek *Environmental, Social, and Governance* (ESG). Implementasi *Environmental, Social, and Governance* (ESG) tidak hanya sekali dilakukan dan berhenti, namun ini akan menjadi awal dari perjalanan yang akan terus diperbaiki untuk menuju pembiayaan yang hijau dan berkelanjutan sebagaimana komitmen Indonesia yang menjadi salah satu topik dalam Pertemuan G20 (Kementerian Keuangan, 2022).

## 1.2 Ruang Lingkup Masalah

*United Nations* (PBB) telah mengesahkan dokumen yang berjudul “*Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*” pada

Agenda 2030. Sebagai konsekuensi dari diratifikasinya SDG's, sehingga pemerintah melakukan percepatan dalam rangka mencapai SDGs dengan menetapkan Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan berkelanjutan. Dalam mencapai SDGs, salah satu standar yang sering digunakan sebagai parameter dalam pelaksanaan pembangunan adalah standar *Environmental, Social, and Governance* (ESG) (KPBU Kemenkeu, 2022). ESG merupakan konsep yang penting dalam menjalankan strategi perusahaan yang berkaitan dengan kinerja perusahaan (Fithriyana *et al.*, 2022).

Bursa Efek Indonesia (BEI) menjadi bagian dari *Sustainable Stock Exchanges* (SSE) pada 18 April 2019. SSE merupakan wadah bursa efek global untuk mendorong terciptanya transparansi dari perusahaan atas kegiatan yang berkontribusi dalam penyelesaian masalah terkait *Environmental, Social, and Governance* (ESG).

Dalam beberapa tahun terakhir, kinerja lingkungan, tanggung jawab social dan tata kelola perusahaan menjadi semakin relevan bagi bank dan Lembaga keuangan (Menicucci & Paolucci, 2022). Pada 20 Desember 2021, Bursa Efek Indonesia bekerja sama dengan Yayasan KEHATI (Kenekaragaman Hayati) meluncurkan dua indeks saham berbasis ESG yaitu ESG Sector Leaders IDX KEHATI dan ESG Quality 45 IDX KEHATI. Indeks ESG Sector Leaders IDX KEHATI berisikan saham-saham dengan hasil penilaian kinerja ESG. Sedangkan Indeks ESG Quality 45 IDX KEHATI merupakan indeks yang berisikan 45 saham terbaik dari hasil penilaian kinerja sustainabilitas dan kualitas keuangan perusahaan

serta memiliki likuiditas yang baik untuk dapat di transaksikan sebagai konstituen indeks (KEHATI, 2021).

Dalam Kawasan Asean, terdapat beberapa negara yang menjadi anggota Asean-5 seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Indonesia, dan Filipina yang memimpin dengan menerapkan persyaratan pengungkapan ESG untuk informasi keberlanjutan bagi perusahaan yang terdaftar pada bursa masing-masing negara tersebut. Kelima bursa tersebut juga telah bergabung dalam *Sustainable Stock Exchange Initiative* (SSE). Singapura, Malaysia, Thailand, Indonesia, dan Filipina bergabung pada tahun 2016, 2015, 2014, 2019, 2019 secara berurutan. Hal tersebut memperlihatkan adanya peningkatan untuk mendorong pengungkapan ESG dalam lingkup ASEAN. Dalam survei Corporate Knights, bursa saham dari masing-masing negara tersebut masuk kedalam 47 negara yang sudah menerapkan ESG.

Tabel 1.1 Ranking Bursa ASEAN

Ranking	Country	Disclosure Rate
9	Stock Exchange of Thailand	60.3%
22	Bursa Malaysia	47.6%
24	Singapore Exchange	45.9%
30	Philippine Stock Exchange	37.8%
36	Indonesia Stock Exchange	32.1%

Sumber: (Corporate Knights, 2020)

Pertimbangan ESG kini merasuk ke berbagai aspek industri perbankan dan mempengaruhi keputusan dalam pembiayaan yang diberikan. Integrasi prinsip-

prinsip ESG menunjukkan komitmen bank terhadap praktik-praktik yang bertanggung jawab, memberikan argument yang kuat bagi bank untuk melaporkan kinerja keberlanjutan dengan cara yang terukur. Perusahaan perbankan yang menunjukkan komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip ESG menjadi pilihan investasi yang menarik bagi para investor yang mencari peluang investasi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Dari pemaparan tersebut, maka fokus dan objek penelitian ini adalah perusahaan Perbankan yang melakukan ESG disclosure di lingkup Asean-5 (Singapura, Malaysia, Thailand, Indonesia, dan Filipina).

### 1.3 Identifikasi Masalah

Di negara Singapura, Bursa Singapura (SGX) dengan bangga mengumumkan bahwa tahun 2017 adalah tahun dimana Bursa Singapura bergabung dengan *United Nations Sustainable Stock Exchange (UN SSE Initiative)*. Bursa Singapura percaya bahwa penambahan pelaporan keberlanjutan pada pelaporan keuangan memberikan gambaran yang lebih komprehensif (Bursa Singapura, 2017). Hal ini didukung dengan dikeluarkannya *Listing Rule 711A* dimana setiap emiten yang terdaftar diwajibkan untuk menyiapkan Laporan keberlanjutan tahunan, yang harus menggambarkan praktik keberlanjutan dengan mengacu pada komponen utama yang ditetapkan dalam *Listing Rule 711B* (Bursa Singapura, 2017).

Kemudian di negara tetangga, pada tahun 2007 Malaysia pertama kalinya mewajibkan perusahaan emiten untuk membuat pernyataan terkait tanggung jawab

social perusahaan. Untuk mendukung hal tersebut, Bursa Malaysia telah membuat Langkah besar lainnya dalam mempromosikan praktik keberlanjutan kepada perusahaan-perusahaan emiten pada tahun 2015. Bursa Malaysia memperkenalkan Indeks Lingkungan, Sosial dan Tata kelola (Indeks ESG), dan Indeks FTSE4Good Bursa Malaysia ESG Index (F4GBM Index) kepada ASEAN di tahun 2015 (Wong *et al.*, 2019). Pelaporan keberlanjutan (*sustainability report*) secara efektif diwajibkan bagi semua perusahaan public yang terdaftar mulai tahun 2016 (Bursa Malaysia, 2018). Hal ini didukung dengan dikeluarkannya Amandemen dalam *Practice Note 9* dalam *Listing Requirements* dengan jelas menjabarkan bahwa Laporan tahunan yang dibuat harus berisikan pernyataan keberlanjutan naratif yang mencakup sisi ekonomi, lingkungan, dan social. Bursa Malaysia menerbitkan *Sustainability Reporting Guide* (SRG) yang berfungsi sebagai pedoman atau referensi bagi perusahaan emiten (Bursa Malaysia, 2018).

Di negara Thailand, Bursa Efek Thailand (SET) meluncurkan Panduan Pelaporan Keberlanjutan (*Sustainability Reporting Guide*) untuk perusahaan terbuka bersama dengan metrik ESG untuk setiap kelompok industri, yang mencakup topik material lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) untuk digunakan sebagai panduan pengungkapan informasi terkait keberlanjutan secara transparansi dan berkualitas (SEC Thailand, 2021). Pedoman pelaporan keberlanjutan juga sesuai dengan 56-1 *One Report*, yaitu gabungan dari penyusunan pernyataan pendaftaran tahunan (Form 56-1) dan laporan tahunan (*Form 56-2*). 56-1 *One Report* tidak hanya meringankan beban emiten terkait penyusunan dan penyampaian laporan kinerja tahunan, tetapi juga meningkatkan efisiensi

pengungkapan dengan menyajikan bagaimana bisnis dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip Lingkungan, Sosial dan Tata kelola (ESG) (SEC Thailand, 2021).

Kemudian di Indonesia, konsep bisnis berkelanjutan adalah bisnis yang kinerja bisnisnya selaras dengan prioritas Lingkungan, Sosial, dan Tata kelola (aspek ESG) yang telah dianut oleh perusahaan (Moores Rowland, 2021). Penerapan bisnis berkelanjutan dan ESG juga semakin didorong dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan yang mewajibkan lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik untuk menerapkan penerapan keuangan berkelanjutan.

Lalu di negara Filipina, Bursa Efek Filipina (SEC) merilis *Memorandum Circular* No. 04 yang mewajibkan perusahaan public di Filipina untuk menilai, mengelola, dan menyerahkan Laporan kinerja aspek lingkungan, social, dan tata kelola (aspek ESG) organisasi mereka (SEC Filipina, 2019). Oleh karena itu, berbagai standar internasional seperti G20/OECD *Principles of Corporate Governance* dan ASEAN *Corporate Governance Scorecard* telah dijadikan acuan dalam penyusunan peraturan baru tersebut, guna meningkatkan standar tata kelola perusahaan publik di Filipina dan meningkatkan daya saingnya (ESGN Asia, 2019).

#### **1.4 Perumusan Masalah**

Penelitian yang dilakukan oleh (Shakil *et al.*, 2019), pengungkapan ESG berdampak positif terhadap kinerja keuangan perbankan (ROE, ROA) di negara *emerging markets*. Kemudian didukung penelitian yang dilakukan oleh (Bătae *et al.*, 2021), pengungkapan ESG berdampak positif terhadap kinerja keuangan

Perbankan (ROE, ROA, Tobin's Q) di negara Eropa. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Gholami *et al.*, 2022) menunjukkan bahwa ESG berdampak positif pada kinerja Perbankan di negara Australia (ROA). Namun hasil penelitian yang dilakukan oleh (Menicucci & Paolucci, 2022), menunjukkan pada perusahaan Perbankan di Italia berbeda. Pada penelitian tersebut menunjukkan hubungan yang negatif antara pengungkapan ESG terhadap kinerja perusahaan (ROE, ROA, Tobin's Q). Dengan adanya perbedaan hasil penelitian sebelumnya, mengenai ESG *Disclosure* terhadap kinerja perusahaan, maka penelitian ini akan berfokus untuk mendalami pengaruh ESG terhadap kinerja keuangan Perbankan. Adapun variable yang digunakan adalah *Return on Asset* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE).

Dari pemaparan diatas, peneliti meerususkan permasalahan penelitian sebagai berikut.

1. Pemberlakuan *Environmental, Social, and Governance Disclosure* oleh Perbankan akan berpengaruh terhadap *Return on Asset* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE).
2. Pemberlakuan *Environmental Disclosure* oleh Perbankan akan berpengaruh terhadap *Return on Asset* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE).
3. Pemberlakuan *Social Disclosure* oleh Perbankan akan berpengaruh terhadap *Return on Asset* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE).
4. Pemberlakuan *Governance Disclosure* oleh Perbankan akan berpengaruh terhadap *Return on Asset* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE).

### 1.5 Pertanyaan Riset

Adapun pertanyaan riset (*Research Question*) pada penelitian adalah:

1. Bagaimana pengaruh *Environmental, Social, and Governance Disclosure* pada perusahaan Perbankan terhadap *Return on Asset* (ROA)?
2. Bagaimana pengaruh *Environmental, Social, and Governance Disclosure* pada perusahaan Perbankan terhadap *Return on Equity* (ROE)?
3. Bagaimana pengaruh *Environmental Disclosure* pada perusahaan Perbankan terhadap *Return on Asset* (ROA)?
4. Bagaimana pengaruh *Environmental Disclosure* pada perusahaan Perbankan terhadap *Return on Equity* (ROE)?
5. Bagaimana pengaruh *Social Disclosure* pada perusahaan Perbankan terhadap *Return on Asset* (ROA)?
6. Bagaimana pengaruh *Social Disclosure* pada perusahaan Perbankan terhadap *Return on Equity* (ROE)?
7. Bagaimana pengaruh *Governance Disclosure* pada perusahaan Perbankan terhadap *Return on Asset* (ROA)?
8. Bagaimana pengaruh *Governance Disclosure* pada perusahaan Perbankan terhadap *Return on Equity* (ROE)?

### 1.6 Pembatasan Masalah

Tujuan dari pembatasan masalah agar penulis dapat memfokuskan penelitian yang dilakukan guna menghasilkan temuan yang benar dan relevan.

Maka dari itu, pembatasan masalah yang akan dikaji dalam penelitian sebagai berikut.

- 1) Penelitian hanya berfokus pada perusahaan sub sektor perbankan yang mempublikasikan laporan keuangannya di situs web resmi masing-masing lembaga perbankan maupun yang terdapat di Bursa Efek masing-masing negara yang dijadikan objek penelitian.
- 2) Penelitian hanya berfokus pada perusahaan sub sektor Perbankan yang mempublikasikan skor ESG nya pada Bloomberg periode tahun 2017 hingga 2021.
- 3) Fokus pada penelitian ini akan membahas mengenai *ESG Disclosure* beserta sub-komponennya yaitu *Environmental Disclosure*, *Social Disclosure*, dan *Governance Disclosure* dan kaitannya terhadap kinerja perbankan yang dapat dilihat pada laporan keuangan.
- 4) Penelitian ini juga memakai *bank size*, *financial leverage*, *asset quality*, serta *gross domestic product* (GDP) sebagai variabel kontrol.

### 1.7 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis bagaimana pengaruh *Environmental, Social, and Governance Disclosure* pada perusahaan Perbankan terhadap *Return on Asset* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE).
2. Menganalisis bagaimana pengaruh *Environmental Disclosure* pada perusahaan Perbankan terhadap *Return on Asset* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE).

3. Menganalisis bagaimana pengaruh *Social Disclosure* pada perusahaan Perbankan terhadap *Return on Asset* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE).
4. Menganalisis bagaimana pengaruh *Governance Disclosure* pada perusahaan Perbankan terhadap *Return on Asset* (ROA) *Return on Equity* (ROE).

### 1.8 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan hasil penelitian dapat memberikan manfaat yang antara lain sebagai berikut :

#### 1. Bagi Akademisi

Temuan dari penelitian diharapkan dapat menginformasikan para pembaca dan dapat melengkapi hasil penelitian sebelumnya. Hal ini juga dimaksudkan agar temuan penelitian ini dapat digunakan dalam bahan penelitian selanjutnya mengenai *Environmental, Social, and Governance Disclosure*. Selain itu penelitian ini diharapkan untuk memberikan informasi pengaruh pengungkapan ESG terhadap kinerja perusahaan perbankan di kawasan ASEAN, serta pemahaman tentang perlunya pengungkapan ESG bagi suatu perusahaan.

#### 2. Bagi Non Akademisi

Diharapkan temuan dari penelitian ini akan memberikan pandangan kepada pihak-pihak praktisi bidang terkait untuk meningkatkan kredibilitas informasi terkait aspek non keuangan melalui pengungkapan skor ESG dan memberikan refrensi, masukan, dan saran untuk kedepannya.

### 1.9 Sistematika Penulisan

#### BAB I : PENDAHULUAN

PBB mengesahkan Agenda 2030 yang berisikan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan 169 target yang memperlihatkan masalah *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang harus ditangani sebelum tahun 2030 termasuk didalamnya mengenai isu-isu keuangan berkelanjutan. Dalam mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs), salah satu standar yang sering digunakan sebagai parameter dalam pelaksanaan pembangunan adalah standar *Environmental, Social, and Governance* (ESG). Menyadari begitu pentingnya ESG, ASEAN ikut ambil peran dalam mewujudkan Agenda 2030 untuk mencapai tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) khususnya untuk meningkatkan keuangan berkelanjutan agar dapat terlaksana dengan baik.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Terkait dengan penelitian mengenai *Environmental, Social, and Disclosure* (ESG) terdapat beberapa teori yang mendukung yaitu teori *stakeholder* merupakan teori yang memiliki pandangan bahwa perusahaan tidak hanya mementingkan keuntungan saja tetapi mampu menyelaraskan semua pemangku kepentingan dan karena itu bisnis perusahaan tersebut berkelanjutan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Lalu teori yang mendukung selanjutnya yaitu teori legitimasi dimana teori tersebut memiliki pandangan bahwa suatu organisasi merupakan bagian dari sistem sosial yang luas dan dipakai sebagai penjelasan atas reaksi perusahaan atau korporasi terhadap ancaman

legitimasi dalam kontrak sosialnya. Kemudian dikaitkan dengan teori keagenan yaitu teori yang menjelaskan hubungan antara pemilik perusahaan (*principal*) dan mereka yang mengelola perusahaan (*agent*) dalam mencapai tujuan bersama serta memberikan informasi mengenai *Environmental, Social, and Governance (ESG) Disclosure* untuk kepentingan bersama.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Objek dalam penelitian ini adalah negara-negara anggota ASEAN. Penelitian ini menggunakan Teknik *purposive sampling* dan sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan sub-sektor Perbankan ASEAN, khususnya Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Periode dalam penelitian ini dimulai dari tahun 2017 hingga tahun 2021 yaitu selama lima tahun. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data panel dimana penelitian ini menguji pengaruh variabel independent yaitu *ESG Disclosure* terhadap variabel dependen yaitu ROA dan ROE dengan variabel control yaitu *bank size, financial leverage*, dan GDP. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear dengan beberapa uji menggunakan aplikasi E-Views.

### **BAB IV : HASIL DAN ANALISIS**

Pada bab ini akan memaparkan hasil dan analisis mengenai dampak penerapan *Environmental, Social, and Governance (ESG) Disclosure* terhadap kinerja Perbankan dengan menggunakan proksi ROA dan ROE di ASEAN, khususnya di negara Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand,

dan Filipina. Dari hasil riset, akan diungkap apa saja implikasi manajerial yang dapat dilakukan.

## **BAB V : PENUTUP**

Pada bab V akan memberikan kesimpulan atas hasil analisis penelitian yang diteliti berdasarkan interpretasi analisis pengolahan data, temuan keterbatasan penelitian, serta saran guna sebagai acuan yang dapat mendasari penelitian yang akan datang agar penelitian tersebut dapat dikembangkan dan dapat diperbaiki.

